

# DI BALIK LAYAR PEMILU

Perjalanan Pengawas Ad Hoc Kabupaten  
Lamongan Mengawal Integritas Demokrasi

Ahmad Sholikin • Yendra Erison • Nurul Laili  
Editor: Bawaslu Kabupaten Lamongan



## PROLOG

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Om Shanti shanti oom, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua.*

*"Di Balik Layar Pemilu: Perjalanan Pengawas Ad Hoc Kabupaten Lamongan Mengawal Demokrasi"*

Pemilihan umum (Pemilu) adalah momentum krusial dalam perjalanan demokrasi sebuah bangsa. Di dalamnya, suara rakyat menjadi tonggak utama untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Namun, apa yang terlihat di permukaan sering kali hanya hasil akhir dari kerja panjang yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu aktor penting yang jarang mendapat perhatian adalah para pengawas ad hoc—mereka yang berada di garda terdepan untuk memastikan Pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan. Pengawas ad hoc memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Dengan waktu yang terbatas, sumber daya yang serba minimal, serta tekanan dari berbagai pihak, mereka berjuang mengawal proses demokrasi hingga ke pelosok-pelosok daerah. Di Kabupaten Lamongan, tugas ini menjadi semakin kompleks karena karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari daerah pesisir hingga pedalaman. Tantangan geografis dan sosial menjadi ujian tersendiri yang harus dihadapi dengan kesungguhan hati.

Buku ini adalah upaya untuk mengabadikan kisah perjuangan tersebut. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya berisi tugas administratif atau teknis, tetapi juga menyuguhkan kisah humanis di balik layar Pemilu. Melalui pengalaman-pengalaman ini, pembaca diajak memahami betapa besarnya peran pengawas ad hoc dalam menjaga integritas Pemilu, meski sering kali mereka bekerja dalam sunyi tanpa sorotan publik. Di balik tugas yang tampak formal, pengawas ad

hoc menghadapi tantangan nyata di lapangan. Dari laporan pelanggaran yang harus diusut secara cermat hingga menghadapi tekanan dari oknum tertentu yang mencoba menggoyahkan proses demokrasi. Mereka kerap harus mengambil keputusan sulit dalam waktu singkat, dengan mempertaruhkan kenyamanan, bahkan keamanan pribadi mereka.

Kabupaten Lamongan menawarkan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan Pemilu. Sebagai daerah dengan keunikan geografis dan sosial, Lamongan memiliki tantangan spesifik yang tidak ditemui di tempat lain. Misalnya, upaya pengawasan di daerah pesisir dengan aksesibilitas terbatas atau menjangkau komunitas pedesaan dengan budaya yang sangat khas. Semua ini membutuhkan kecerdasan, kesabaran, dan kreativitas pengawas ad hoc dalam menjalankan tugasnya. Selain tantangan fisik, pengawas ad hoc juga menghadapi dilema moral dan tekanan emosional. Ketika pelanggaran ditemukan, mereka tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga penegak keadilan. Dalam kondisi tertentu, mereka harus menghadapi pihak-pihak yang lebih berkuasa atau memiliki pengaruh besar di masyarakat. Situasi ini sering kali menempatkan mereka dalam posisi yang serba sulit, antara menjaga integritas dan menjaga hubungan sosial.

Buku ini juga berupaya mengungkap sisi lain yang jarang diketahui publik—bagaimana mereka yang bekerja di balik layar ini menjaga semangat meski dihadapkan pada keterbatasan. Dengan anggaran yang sering kali terbatas, fasilitas minim, dan dukungan yang tidak selalu memadai, para pengawas ad hoc tetap menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Mereka bekerja tidak hanya untuk menyukseskan Pemilu, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri. Lewat narasi ini, kita diajak untuk merenungkan kembali

nilai-nilai yang seharusnya ada dalam setiap Pemilu. Kejujuran, keadilan, dan transparansi tidak akan terwujud tanpa adanya pengawas yang bekerja dengan penuh integritas. Kisah-kisah dalam buku ini menjadi bukti nyata bahwa pengabdian yang tulus dapat menjadi fondasi yang kuat bagi keberlangsungan demokrasi.

Semoga buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi perjalanan para pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang menjaga nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Dengan memahami perjuangan mereka yang berada di balik layar, kita diajak untuk lebih menghargai proses Pemilu dan terus berkomitmen menjaga integritas demokrasi. Selamat membaca, dan semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua untuk selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

**Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan Bawaslu,**

**Muttaqin**

## Daftar Isi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **LATAR BELAKANG**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar utama demokrasi yang menjadi wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Dalam proses ini, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah kebijakan negara di masa depan. Pemilu bukan hanya sekadar ritual politik, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang legitimate dan representatif. Namun, keberhasilan Pemilu tidak hanya bergantung pada proses pemungutan suara semata, tetapi juga pada pengawasan yang efektif untuk memastikan kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap tahapannya.

Kabupaten Lamongan, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, memiliki tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang beragam, mulai dari daerah pesisir hingga pedalaman, yang memengaruhi dinamika pelaksanaan Pemilu. Selain itu, kompleksitas permasalahan seperti politik uang, intimidasi, dan pelanggaran administrasi menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Di sinilah peran pengawas ad hoc menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi.

Pengawas ad hoc, yang terdiri dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), adalah elemen

penting dalam struktur pengawasan Pemilu. Mereka bekerja di lapangan untuk memastikan bahwa setiap tahap Pemilu berjalan sesuai dengan aturan. Meski memiliki peran strategis, pengawas ad hoc sering kali bekerja dalam kondisi yang penuh tantangan, baik dari segi sumber daya, dukungan, maupun tekanan sosial. Hal ini mencerminkan betapa besar tanggung jawab yang mereka emban dalam menjaga demokrasi.

Dalam konteks Kabupaten Lamongan, pengawas ad hoc menghadapi berbagai tantangan yang khas. Wilayah yang terdiri dari 27 kecamatan dan ratusan desa/kelurahan ini memiliki dinamika sosial yang unik. Tantangan geografis, seperti wilayah pesisir yang sulit dijangkau, memerlukan strategi khusus dalam pengawasan. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat yang beragam juga memengaruhi pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban sebagai pemilih. Situasi ini sering kali memerlukan upaya ekstra dari pengawas ad hoc untuk memberikan edukasi dan memastikan partisipasi masyarakat yang maksimal.

Politik uang menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan. Praktik ini tidak hanya mencederai integritas Pemilu, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Pengawas ad hoc memiliki tugas berat untuk mendeteksi, mencegah, dan menindaklanjuti praktik-praktik semacam ini. Dalam situasi tertentu, mereka juga harus menghadapi tekanan dari oknum-oknum yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Tantangan ini menguji integritas dan keberanian para pengawas ad hoc.

Selain politik uang, isu lainnya adalah intimidasi terhadap pemilih maupun pengawas. Dalam beberapa kasus, pengawas ad hoc dihadapkan pada situasi yang memerlukan keberanian ekstra untuk menjalankan tugas mereka. Mereka harus tetap netral dan tegas dalam menghadapi berbagai tekanan, baik dari masyarakat, peserta Pemilu, maupun pihak lain yang berkepentingan. Meski demikian, dedikasi para pengawas ad hoc tetap menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga proses Pemilu tetap berjalan sesuai aturan.

Dalam pelaksanaan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Lamongan berperan sebagai koordinator utama dalam pengawasan. Bawaslu bertugas mengatur, memantau, dan memberikan arahan kepada pengawas ad hoc agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti KPU, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan Pemilu. Kolaborasi ini sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama proses Pemilu.

Pada Pemilu 2024, Kabupaten Lamongan akan menghadapi dinamika yang lebih kompleks seiring dengan bertambahnya jumlah pemilih yang terdaftar. Berdasarkan data terbaru, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lamongan mencapai lebih dari 1 juta jiwa, yang tersebar di ratusan desa dan



ribuan TPS. Pemilu 2024 juga akan melibatkan berbagai jenis pemilihan, mulai dari Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota. Dengan kompleksitas ini, pengawasan menjadi lebih penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran pada setiap tahap.

Selain itu, Pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan juga melibatkan sekitar 7.000 pengawas ad hoc, termasuk Panwascam, PKD, dan PTPS. Pengawas ini akan dilatih secara intensif untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani berbagai pelanggaran Pemilu. Pelatihan tersebut meliputi pemahaman terhadap regulasi Pemilu, teknik investigasi, hingga manajemen konflik di lapangan.

Bawaslu Kabupaten Lamongan juga memperkenalkan inovasi digital untuk mendukung pengawasan Pemilu 2024. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi pelaporan digital yang memungkinkan pengawas di lapangan melaporkan pelanggaran secara real-time. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, sekaligus memberikan akses yang lebih transparan bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengangkat kisah para pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan yang sering kali bekerja dalam senyap tanpa sorotan publik. Perjalanan mereka tidak hanya mencerminkan dedikasi, tetapi juga perjuangan yang penuh tantangan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Dari proses pengawasan di TPS hingga investigasi pelanggaran,

setiap langkah yang mereka ambil adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.

Melalui buku ini, pembaca diajak untuk memahami realitas di balik layar Pemilu. Tidak hanya tentang aturan dan prosedur, tetapi juga tentang manusia-manusia biasa yang mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa. Kisah-kisah dalam buku ini memberikan gambaran tentang perjuangan, integritas, dan komitmen yang luar biasa dari para pengawas ad hoc. Semoga buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi perjalanan mereka, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi yang kita junjung bersama.

### **Signifikansi dan Relevansi**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen kunci dalam sistem demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah kebijakan negara, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, keberhasilan Pemilu tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, melainkan juga dari proses pelaksanaannya yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi yang inklusif. Oleh karena itu, pengawasan Pemilu menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dalam konteks Kabupaten Lamongan, signifikansi pengawasan Pemilu dapat dilihat dari peran strategisnya dalam memastikan bahwa setiap suara yang diberikan oleh masyarakat dihitung dengan jujur dan adil. Sebagai daerah dengan populasi

lebih dari satu juta jiwa yang tersebar di berbagai wilayah geografis, Lamongan menghadapi tantangan unik dalam pelaksanaan Pemilu. Keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat memengaruhi dinamika politik lokal, sehingga pengawasan yang ketat menjadi sangat relevan untuk mencegah potensi pelanggaran.

Pengawas ad hoc, yang meliputi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), memiliki posisi sentral dalam struktur pengawasan Pemilu. Mereka adalah ujung tombak yang langsung berinteraksi dengan proses di lapangan. Peran mereka tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi Pemilu, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak-hak mereka sebagai pemilih. Dalam konteks ini, kehadiran pengawas ad hoc sangat signifikan dalam menciptakan Pemilu yang berintegritas.

Relevansi pengawasan Pemilu di Kabupaten Lamongan juga tercermin dalam upaya mencegah dan menangani praktik-praktik yang mencederai demokrasi, seperti politik uang, manipulasi suara, dan intimidasi. Tantangan-tantangan ini tidak hanya merusak kredibilitas Pemilu tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif sangat relevan untuk memastikan bahwa Pemilu menjadi sarana yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Dalam Pemilu 2024, pengawasan menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas proses dan meningkatnya jumlah pemilih yang terdaftar. Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Lamongan memiliki lebih dari 1 juta pemilih yang tersebar di ribuan TPS. Selain itu, Pemilu 2024 melibatkan berbagai jenis pemilihan, mulai dari Pemilihan Presiden hingga anggota legislatif di berbagai tingkatan. Kompleksitas ini menuntut pengawas Pemilu untuk bekerja lebih keras dalam mengawasi setiap tahapan, mulai dari pendaftaran calon, masa kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan rekapitulasi suara.

Keberadaan teknologi digital dalam Pemilu 2024 juga menambah dimensi baru dalam pengawasan. Di Kabupaten Lamongan, Bawaslu telah memperkenalkan sistem pelaporan digital yang memungkinkan pengawas ad hoc melaporkan pelanggaran secara real-time. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan. Dengan demikian, pengawas Pemilu memiliki alat yang lebih efektif untuk menjalankan tugas mereka, menjadikan peran mereka semakin signifikan dalam menjaga integritas Pemilu.

Di sisi lain, relevansi pengawasan Pemilu juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam beberapa wilayah di Kabupaten Lamongan, tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah pedesaan yang memiliki akses informasi terbatas. Pengawas ad hoc tidak hanya bertugas mengawasi tetapi juga memberikan

edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka secara bertanggung jawab. Dengan cara ini, pengawasan Pemilu tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam mendorong partisipasi yang lebih luas.

Selain itu, keberadaan pengawas Pemilu memiliki dampak jangka panjang terhadap penguatan demokrasi lokal. Dengan memastikan bahwa Pemilu berjalan sesuai aturan, pengawas membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Hal ini penting untuk menciptakan budaya demokrasi yang sehat, di mana masyarakat merasa bahwa suara mereka benar-benar diperhitungkan. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini akan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam proses politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Signifikansi dan relevansi pengawasan Pemilu juga terlihat dari tantangan yang dihadapi dalam menegakkan aturan. Kabupaten Lamongan, seperti wilayah lain di Indonesia, tidak lepas dari tekanan-tekanan politik yang dapat memengaruhi independensi pengawas. Oleh karena itu, diperlukan integritas dan profesionalisme yang tinggi dari setiap pengawas ad hoc untuk menghadapi tekanan tersebut. Pelatihan yang diberikan kepada pengawas sebelum Pemilu menjadi sangat penting dalam membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas secara efektif.

Dalam buku ini, kisah-kisah para pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan akan diangkat untuk memberikan

gambaran yang lebih mendalam tentang perjuangan mereka dalam mengawal demokrasi. Dari tantangan teknis hingga dilema moral, setiap cerita mencerminkan betapa pentingnya peran mereka dalam memastikan Pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Dengan memahami signifikansi dan relevansi pengawasan Pemilu, diharapkan pembaca dapat lebih menghargai upaya yang dilakukan oleh para pengawas ad hoc serta pentingnya peran mereka dalam menjaga nilai-nilai demokrasi.

Buku ini juga menjadi pengingat bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi memerlukan kerja keras dan komitmen dari semua pihak. Melalui pengawasan yang efektif, Pemilu dapat menjadi sarana yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, memperkuat legitimasi pemerintahan, dan membangun kepercayaan publik. Semoga buku ini dapat menginspirasi pembaca untuk terus mendukung upaya penguatan demokrasi, baik melalui partisipasi langsung maupun dengan menghargai kerja keras para pengawas Pemilu yang berada di garis depan.

### **Gambaran Umum Pemilu di Kabupaten Lamongan**

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan salah satu peristiwa politik yang paling dinantikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebagai bagian integral dari proses demokrasi, Pemilu menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat yang akan menentukan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Kabupaten Lamongan, dengan jumlah penduduk yang signifikan dan

dinamika sosial politiknya, memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Pemilu ini.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Lamongan terletak di pesisir utara Pulau Jawa, di antara 6°51' hingga 7°23' Lintang Selatan dan 112°03' hingga 112°33' Bujur Timur. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Tuban di sebelah barat, Kabupaten Gresik di sebelah timur, serta Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang di sebelah selatan. Luas wilayah Kabupaten Lamongan mencapai 1.812,8 km<sup>2</sup>, yang terbagi menjadi 27 kecamatan dan 474 desa/kelurahan.

Secara umum, wilayah Kabupaten Lamongan didominasi oleh daratan, dengan sebagian wilayah berupa dataran rendah yang produktif untuk pertanian. Di sisi lain, pesisir utara Lamongan merupakan kawasan penting bagi sektor perikanan dan pariwisata, dengan ikon wisata seperti Wisata Bahari Lamongan (WBL). Kabupaten ini memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim penghujan yang biasanya berlangsung dari Oktober hingga Maret, dan musim kemarau dari April hingga September. Dinamika kehidupan masyarakatnya yang agraris dan religius memberikan warna tersendiri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.



### **Peta Kabupaten Lamongan**

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan salah satu peristiwa politik yang paling dinantikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebagai bagian integral dari proses demokrasi, Pemilu menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat yang akan menentukan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Kabupaten Lamongan, dengan jumlah penduduk yang signifikan dan dinamika sosial politiknya, memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Pemilu ini.

Kabupaten Lamongan terletak di wilayah pesisir utara Jawa Timur dan terdiri dari 27 kecamatan. Dengan jumlah penduduk



lebih dari satu juta jiwa, Lamongan memiliki potensi suara yang cukup besar. Dinamika politik di wilayah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keberagaman etnis, agama, dan tingkat pendidikan masyarakat. Dalam menghadapi Pemilu 2024, persiapan demi persiapan terus dilakukan. Setiap langkah dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan baik, mulai dari pendaftaran pemilih hingga distribusi logistik ke tempat-tempat pemungutan suara. Kabupaten Lamongan, dengan topografi yang beragam, menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam menjangkau daerah-daerah terpencil. Namun, semangat demokrasi tetap terlihat jelas di masyarakatnya yang berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pra-Pemilu.

Di Kabupaten Lamongan, partisipasi masyarakat dalam Pemilu merupakan salah satu indikator keberhasilan demokrasi. Sebelumnya, tingkat partisipasi di wilayah ini tergolong tinggi, mencerminkan kesadaran politik yang kuat di kalangan masyarakat. Pada Pemilu kali ini, antusiasme tampaknya tidak berkurang. Berbagai pihak telah menggalang kampanye dan sosialisasi, dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi, terutama dari kalangan pemilih muda.

Lamongan dikenal sebagai daerah yang religius, di mana tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Para tokoh ini sering kali menjadi penggerak utama untuk mengajak warga berpartisipasi dalam Pemilu. Mereka tidak hanya mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya,

tetapi juga mengedukasi pentingnya memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah. Generasi muda juga menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan. Banyak komunitas pemuda yang aktif dalam kampanye, membuktikan bahwa demokrasi di Lamongan hidup dan berkembang.

Dinamika politik di Kabupaten Lamongan selalu menarik untuk diikuti. Di tengah persaingan antarpolitical politik, muncul figur-figur baru yang membawa harapan dan inovasi. Partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, dan Partai Golkar terus berusaha memperkuat basis massa mereka di wilayah ini. Kampanye yang dilakukan pun tak jarang menampilkan pendekatan yang lebih personal, menysasar kebutuhan spesifik masyarakat lokal.

Salah satu daya tarik Pemilu di Lamongan adalah munculnya calon-calon legislatif yang berasal dari kalangan muda dan perempuan. Kehadiran mereka membawa angin segar dalam dinamika politik lokal. Mereka menawarkan visi pembangunan yang lebih inklusif, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal. Tidak hanya itu, isu-isu strategis seperti peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi juga menjadi tema utama dalam berbagai kampanye.

Meski semangat demokrasi di Kabupaten Lamongan tinggi, pelaksanaan Pemilu di wilayah ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Geografis yang beragam, dengan banyak desa

terpencil, menjadi salah satu hambatan utama dalam distribusi logistik Pemilu. Namun, pemerintah daerah dan KPU setempat telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk dengan memanfaatkan teknologi dan memperkuat koordinasi dengan aparat setempat.

Selain tantangan logistik, praktik politik uang dan penyebaran informasi hoaks juga menjadi perhatian serius. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, penyebaran hoaks dapat dengan cepat memengaruhi opini publik. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah meningkatkan pengawasan dan melakukan kampanye edukasi untuk melawan hoaks dan meningkatkan literasi digital masyarakat.

Keamanan dan ketertiban juga menjadi prioritas. Meski secara umum Lamongan dikenal sebagai daerah yang damai, potensi konflik tetap ada, terutama di wilayah-wilayah dengan persaingan politik yang ketat. Aparat keamanan telah bersiaga untuk memastikan bahwa proses Pemilu berjalan lancar tanpa gangguan berarti.

Pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi lokal. Partisipasi aktif masyarakat dan komitmen semua pihak diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Para pemimpin yang terpilih diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kabupaten Lamongan memiliki potensi besar, baik dari segi sumber daya manusia maupun alam. Dengan kepemimpinan yang tepat, daerah ini dapat tumbuh menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial di Jawa Timur. Pemilu ini tidak hanya menjadi ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan adalah momen penting yang akan menentukan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Dengan persiapan yang matang, antusiasme masyarakat, dan pengawasan yang ketat, proses demokrasi ini diharapkan berjalan lancar, jujur, dan adil. Kabupaten Lamongan siap menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekadar proses politik, tetapi juga sebuah perayaan kebersamaan dan komitmen untuk masa depan yang lebih baik.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai aspek pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan. Fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana Bawaslu Kabupaten Lamongan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memastikan demokrasi yang bersih dan transparan, serta mengeksplorasi peran pengawas ad hoc dalam mendukung pengawasan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi di

lapangan terkait pelaksanaan pengawasan pemilu dan kontribusi pengawas ad hoc dalam memperkuat demokrasi di Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang pelaksanaan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi secara rinci proses, kebijakan, serta praktik yang dijalankan oleh Bawaslu dan pengawas ad hoc dalam menjaga keberlangsungan pemilu yang adil dan transparan.

Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan berbagai fenomena yang berkaitan dengan proses pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan, termasuk kontribusi pengawas ad hoc dalam mencapai tujuan pengawasan. Pendekatan ini membantu peneliti menguraikan secara rinci langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi, pencapaian yang diraih, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang.

Penelitian ini dilakukan dalam konteks pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan, sebuah wilayah dengan dinamika sosial-politik yang khas. Dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan beragam, Kabupaten Lamongan menghadapi

berbagai tantangan dalam pelaksanaan pemilu, termasuk potensi konflik, pelanggaran aturan pemilu, dan kebutuhan akan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi krusial dalam memastikan keberlangsungan pemilu yang demokratis dan transparan.

Penelitian ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan tugas oleh pengawas ad hoc yang berperan sebagai ujung tombak dalam pengawasan di tingkat lokal. Pengawas ad hoc, seperti panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dan pengawas di tingkat desa, memiliki tanggung jawab penting dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran selama proses pemilu. Studi ini mengeksplorasi bagaimana pengawas ad hoc tersebut berkoordinasi dengan Bawaslu dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan pengawasan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pengawasan pemilu, khususnya di Kabupaten Lamongan. Dengan memahami secara mendalam praktik pengawasan yang ada, penelitian ini akan memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan oleh Bawaslu dalam menyusun kebijakan dan program pengawasan di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga relevan bagi pengembangan sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien, baik di tingkat kabupaten maupun nasional.

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai pengawasan pemilu di

Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh Bawaslu dan pengawas ad hoc. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama dalam meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga pemilu yang bersih dan adil. Dengan pemaparan yang lebih mendalam ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan dan menjadi dasar untuk perbaikan yang berkelanjutan di masa depan.

### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan, pengawas ad hoc, dan masyarakat yang turut terlibat dalam proses pemilu di Kabupaten Lamongan. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur untuk memberikan kebebasan kepada responden dalam menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara mendalam, khususnya terkait dengan pelaksanaan pengawasan pemilu.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen-dokumen resmi, seperti laporan tahunan Bawaslu Kabupaten Lamongan dan materi lainnya yang relevan dengan pengawasan pemilu. Data sekunder ini

digunakan untuk melengkapi dan mendukung temuan yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Teknik wawancara digunakan untuk mendalami pengalaman dan pandangan para informan kunci, termasuk komisioner Bawaslu, pengawas ad hoc, dan masyarakat yang berperan aktif dalam proses pengawasan. Pendekatan semi-terstruktur yang diterapkan dalam wawancara memungkinkan responden berbagi informasi secara terbuka mengenai tantangan, keberhasilan, dan peran mereka dalam menjaga demokrasi. Observasi langsung juga dilakukan untuk memahami dinamika pelaksanaan pengawasan pemilu di lapangan, termasuk interaksi antara pengawas ad hoc dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, dokumentasi menjadi bagian integral dalam pengumpulan data, di mana dokumen-dokumen seperti laporan kegiatan, program pengawasan, dan materi pelatihan pengawas ad hoc dianalisis untuk memperkaya temuan penelitian.

### **Analisis Data**

Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan dengan teknik kualitatif dan pendekatan deskriptif. Tahap pertama dalam analisis adalah reduksi data, di mana informasi yang relevan diorganisasi dan disaring untuk menghilangkan data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Informasi yang telah



direduksi kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tertentu berdasarkan tema-tema yang muncul selama proses pengumpulan data, sehingga memudahkan dalam memahami pola-pola fenomena yang diteliti.

Pada tahap berikutnya, data yang telah dikategorikan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan. Proses interpretasi ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan terkait efektivitas program pengawasan dan kontribusi pengawas ad hoc dalam menjaga kualitas demokrasi. Hasil dari analisis tersebut disusun dalam laporan penelitian yang menggambarkan temuan secara detail, termasuk rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang.

### **Batasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Fokus penelitian terbatas pada pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan dan pengawas ad hoc di tingkat kabupaten, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada konteks wilayah lain. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup periode pelaksanaan pemilu tertentu, sehingga tidak mencerminkan pengawasan yang dilakukan di luar periode tersebut.

Meskipun memiliki batasan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai upaya

pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan. Temuan-temuan yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi penting bagi perbaikan sistem pengawasan pemilu di masa mendatang, termasuk penguatan kapasitas pengawas ad hoc dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi yang bersih, adil, dan transparan.

## **BAB II**

### **SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN**

#### **Bawaslu Kabupaten Lamongan**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamongan merupakan lembaga independen yang bertugas memastikan integritas, keadilan, dan transparansi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat kabupaten. Sebagai bagian dari sistem pengawasan nasional di bawah Bawaslu RI, lembaga ini memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di wilayah Kabupaten Lamongan melalui berbagai tugas dan fungsinya.

Bawaslu Kabupaten Lamongan bertanggung jawab mengawasi seluruh tahapan Pemilu, termasuk pemilu legislatif, pilkada, dan pemilu presiden. Tugas ini mencakup pengawasan pada proses pencalonan, masa kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Dengan memastikan setiap tahapan berlangsung sesuai peraturan yang berlaku, Bawaslu berupaya menciptakan Pemilu yang adil, jujur, dan bebas dari kecurangan. Selain itu, Bawaslu memiliki wewenang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayahnya dengan cara menerima laporan, melakukan investigasi, dan mengambil langkah hukum yang sesuai.

Selain tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lamongan juga menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini mencakup pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam Pemilu, prosedur pelaksanaan Pemilu, serta

pentingnya partisipasi aktif untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas. Dalam hal ini, Bawaslu juga berperan sebagai fasilitator untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas Pemilu.

Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi salah satu strategi kunci Bawaslu Kabupaten Lamongan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu bekerja sama dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Lamongan, aparat keamanan seperti Polres, dan instansi terkait lainnya. Kerja sama ini bertujuan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Pemilu, sehingga masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan atau intimidasi.

Tantangan dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik setempat. Untuk itu, Bawaslu berupaya memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat berpartisipasi secara aktif dan sah sesuai aturan. Bawaslu juga memiliki komitmen kuat untuk mencegah dan mengurangi berbagai bentuk pelanggaran, seperti praktik politik uang, kampanye hitam, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu.

Bawaslu Kabupaten Lamongan juga mengadopsi teknologi modern untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif. Penggunaan sistem informasi terintegrasi memungkinkan proses pencatatan pelanggaran, pengawasan penghitungan suara, dan laporan hasil Pemilu dilakukan dengan lebih

transparan. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas Bawaslu, tetapi juga mempermudah masyarakat dalam memantau perkembangan Pemilu secara real-time.

Dalam menyelesaikan sengketa Pemilu, Bawaslu Kabupaten Lamongan berperan sebagai mediator dan penegak keadilan. Sengketa yang melibatkan peserta Pemilu, pemilih, atau pihak lain diselesaikan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan berbasis fakta. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu serta memastikan keputusan yang diambil mencerminkan keadilan.

Pentingnya Bawaslu dalam mengawal Pemilu demokratis tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap suara masyarakat dihargai dan dihitung dengan jujur. Hal ini menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses Pemilu.

Bawaslu juga berperan sebagai penyeimbang dalam sistem Pemilu. Dalam situasi di mana terdapat potensi ketidakadilan, seperti intimidasi pemilih atau praktik politik uang, Bawaslu hadir untuk menegakkan aturan dan menjaga agar Pemilu tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pelaksanaan Pemilu dapat lebih terjamin kualitasnya.

Keberadaan Bawaslu juga penting dalam mencegah konflik yang mungkin timbul selama proses Pemilu. Dengan melakukan pengawasan sejak dini dan mengambil langkah

proaktif, Bawaslu dapat memitigasi potensi permasalahan yang dapat merusak integritas Pemilu. Ini termasuk mengidentifikasi titik rawan konflik dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait.

Edukasi yang dilakukan Bawaslu kepada masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan Pemilu yang demokratis. Dengan memberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya partisipasi aktif dan kesadaran akan hak-hak mereka, masyarakat dapat lebih berperan dalam menjaga kualitas Pemilu. Edukasi ini juga mendorong masyarakat untuk menolak segala bentuk kecurangan.

Terakhir, Bawaslu berfungsi sebagai penjaga transparansi dalam Pemilu. Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi modern, Bawaslu memastikan bahwa setiap proses Pemilu dapat dipantau oleh publik. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana akuntabilitas bagi penyelenggara Pemilu. Dengan transparansi yang terjaga, demokrasi di tingkat lokal maupun nasional dapat tumbuh dengan lebih sehat.

Melalui seluruh fungsi dan perannya, Bawaslu Kabupaten Lamongan tidak hanya berfokus pada pengawasan teknis, tetapi juga pada penguatan sistem demokrasi di tingkat lokal. Edukasi yang berkesinambungan kepada masyarakat dan pengawasan yang profesional menjadikan Bawaslu sebagai pilar penting dalam menjaga kualitas Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Lamongan berkontribusi dalam membangun

kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan melindungi marwah demokrasi di Indonesia.

### **Komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan (Periode 2023-2028)**

Komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan periode 2023-2028, memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya Pemilu di daerah tersebut. Sebagai badan yang bertugas menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum, para komisioner Bawaslu di Lamongan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan atau pelanggaran hukum.

### **Periode 2023-2028**

Masuk ke periode 2023-2028, komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan menghadapi tantangan baru seiring dengan perubahan dinamika politik, sosial, dan teknologi. Pada periode ini, mereka kembali dipercaya untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu, termasuk Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan proses demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman, terutama dengan maraknya informasi yang beredar melalui platform digital dan media sosial (Rahman, 2010). Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada yang juga akan menjadi sorotan besar masyarakat.

Di bawah kepemimpinan komisioner Bawaslu periode 2023-2028, Bawaslu Kabupaten Lamongan semakin mengedepankan pengawasan berbasis teknologi untuk mendukung proses pemantauan yang lebih transparan dan efisien. Mereka memanfaatkan aplikasi pelaporan pelanggaran, pemantauan media sosial untuk mendeteksi potensi penyebaran berita hoaks yang dapat mempengaruhi hasil pemilu, dan alat digital lainnya untuk mengawasi berbagai tahap Pemilu, mulai dari kampanye hingga proses penghitungan suara. Komisioner Bawaslu Lamongan juga semakin fokus pada pembentukan kelembagaan yang kuat di tingkat kecamatan dan desa. Mereka memperkuat keberadaan Pengawas kelurahan/desa (PKD) di setiap desa dan kecamatan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Dalam hal ini, para komisioner berperan sebagai fasilitator yang memberikan pelatihan kepada PKD dan masyarakat tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran Pemilu, serta memastikan hak suara warga tetap terlindungi dari berbagai potensi manipulasi.

Bawaslu Kabupaten Lamongan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk KPU Lamongan, kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya, untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Para komisioner juga berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pengawasan dan penindakan, sehingga masyarakat bisa merasa bahwa proses Pemilu benar-



benar berjalan dengan adil tanpa ada intervensi politik. Pada periode 2023-2028, komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan juga menghadapi tantangan dari segi keberagaman dan karakteristik sosial masyarakat Lamongan yang beragam. Salah satu fokus utama adalah memastikan bahwa semua suara warga, termasuk yang ada di daerah terpencil atau yang mungkin kesulitan mengakses informasi tentang pemilu, tetap dihitung secara adil. Untuk itu, Bawaslu berupaya memperbaiki sistem informasi, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa, guna menjamin partisipasi yang lebih luas dan terhindar dari potensi kecurangan.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan, baik pada periode 2023-2028, memainkan peran yang sangat penting dalam mengawal jalannya demokrasi di tingkat lokal. Mereka berkomitmen untuk menjaga kualitas pemilu dengan memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan. Dengan berfokus pada peningkatan kapasitas pengawasan, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi, Bawaslu Kabupaten Lamongan berusaha untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik dan lebih inklusif, sehingga masyarakat Lamongan dapat merasakan pemilu yang adil dan berkualitas.

Adapun Komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan periode 2023-2028 bisa dilihat sebagaimana gambar berikut:

## **TONI WIJAYA, S. H.** **KETUA BAWASLU LAMONGAN**

Jenis Kelamin : Laki -Laki  
Tempat Tgl. Lahir : Lamongan, 7 November 1979  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Manyar RT. 001 / RW. 002 Kecamatan  
Sekaran Kabupaten Lamongan

Riwayat Pendidikan Terakhir:  
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Lulus Tahun  
2003.

Pengalaman Kepemiluan:  
a. Anggota PPK Pucuk Tahun 2003-2005 (Berturut)  
b. Anggota PPK Pucuk Tahun 2008-2010 (Berturut)  
c. Ketua Panwaslu Kabupaten Lamongan 2012-2014  
d. Ketua Panwaslu Kabupaten Lamongan 2015-2016  
e. Ketua Panwaslu Kabupaten Lamongan 2017 - 2018  
f. Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan Periode 2018 -  
2023



## **M. SYAMSUL, S. PD.**

**KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SENGKETA**

Jenis Kelamin : Laki -Laki  
Tempat Tgl. Lahir : Lamongan, 14 Mei 1972  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Karangnom Wetan, 008/004, Desa  
Karangbinangun, Kabupaten Lamongan

Riwayat Pendidikan Terakhir:  
IKIO Budi Utomo Malang Lulus Tahun 2002

Pengalaman Kepemiluan:  
a. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, 2019  
dan 2020  
b. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pemilu Serentak  
2024



## MUTTAQIN

### KOORDINATOR DIVISI SDMO DAN DIKLAT

Jenis Kelamin : Laki –Laki  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : Lamongan, 6 Juni 1977  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Payaman, Kecamatan Solokuro,  
Kabupaten Lamongan  
Riwayat Pendidikan Terakhir:  
S1 Ilmu Pemerintahan Unmuh Malang 2005

Pengalaman Kepemiluan:  
a.KPPS Tahun 2008  
b.Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan  
Solokuro Tahun 2013 dan 2014  
c. PPK Solokuro Tahun 2020  
d.PPK Solokuro Tahun 2023-2024.



## M. FARID ACHIYANI

### KOORDINATOR DIVISI PP DAN DATIN

Jenis Kelamin : Laki –Laki  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : Lamongan, 31 Juli 1976  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Tanggulrejo RT. 003 / RW. 001 Kecamatan  
Babat Kabupaten Lamongan

Riwayat Pendidikan Terakhir:  
S1 FISIP Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.

Pengalaman Kepemiluan:  
a.Ketua KPPS Tahun 2009-2019  
b.Anggota PPK Babat Tahun 2020  
c.Ketua PPK Babat Pemilu Serentak Tahun 2024





## YULIANTI

### KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS

Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tgl. Lahir : Sondosia, 7 November 1983  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Keranji RT. 005 / RW. 004 Kecamatan  
Paciran, Kabupaten Lamongan

Riwayat Pendidikan Terakhir:  
Universitas Islam Malang Tahun 2002 s.d 2007

Pengalaman Kepemiluan:  
a. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Paciran  
Tahun 2015 dan 2018  
b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Paciran Tahun  
2019 dan 2020



## Alamat Kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan memiliki peran penting dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Alamat kantor Bawaslu Lamongan berada di Jalan Raya Sudirman Nomor 45, Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62212. Gedung ini menjadi pusat kegiatan pengawasan, pengelolaan laporan pelanggaran, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

Untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi atau melaporkan temuan pelanggaran, Bawaslu Lamongan memiliki situs web resmi di <https://lamongan.bawaslu.go.id>. Selain itu, masyarakat dapat menghubungi Bawaslu melalui email di [sekretariat@bawaslu.go.id](mailto:sekretariat@bawaslu.go.id) atau melalui nomor telepon 081234567890. Agar lebih dekat dengan masyarakat dan relevan

di era digital, Bawaslu Lamongan juga aktif di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok dengan akun **@BawasluLamongan**.

Gedung kantor yang digunakan oleh Bawaslu Lamongan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dipinjamkan untuk mendukung tugas pengawasan pemilu. Dengan lokasi strategis di pusat kota Lamongan, kantor ini menjadi tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Keberadaan kantor di jantung kota juga memungkinkan Bawaslu untuk merespons cepat laporan pelanggaran atau keluhan terkait pemilu dari seluruh wilayah Kabupaten Lamongan.

Sebagai pusat pengawasan pemilu di tingkat kabupaten, kantor ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti ruang rapat untuk koordinasi internal, ruang administrasi untuk kegiatan operasional, serta ruang pengaduan masyarakat. Di sini, masyarakat dapat melaporkan temuan pelanggaran secara langsung atau melalui berbagai saluran komunikasi yang telah disediakan. Selain itu, kantor ini juga memiliki ruang khusus untuk pelatihan dan bimbingan teknis bagi para pengawas pemilu tingkat desa dan kecamatan, memastikan seluruh jajaran pengawas memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.

Lokasi kantor yang berada di pusat kota memberikan banyak keuntungan, terutama dalam hal kolaborasi dengan berbagai pihak. Bawaslu Lamongan sering bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan, kepolisian,

dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung pengawasan yang efektif. Keberadaan kantor di lokasi strategis ini juga mempermudah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

Bawaslu Kabupaten Lamongan menjalankan perannya dengan dukungan struktur organisasi yang terdiri dari empat divisi utama yang saling melengkapi. Divisi Pencegahan dan Humas memiliki peran penting dalam menyosialisasikan pentingnya pemilu yang bersih dan partisipasi aktif masyarakat. Divisi ini juga berupaya mencegah potensi pelanggaran melalui edukasi tentang aturan pemilu dan kewajiban semua pihak yang terlibat, termasuk netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI.

Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin) bertugas menangani laporan pelanggaran yang diterima, baik melalui pengaduan masyarakat maupun hasil temuan di lapangan. Divisi ini bekerja secara profesional dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindaklanjuti berbagai pelanggaran pemilu, mulai dari pelanggaran administratif hingga pidana. Mereka juga memastikan bahwa semua data pelanggaran dikelola secara sistematis untuk memudahkan tindak lanjut yang terorganisir dan transparan.

Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menjadi ujung tombak dalam menangani berbagai persoalan hukum yang muncul selama pelaksanaan pemilu. Sengketa yang sering

terjadi, seperti permasalahan daftar pemilih atau pencalonan, ditangani dengan pendekatan mediasi yang berlandaskan hukum. Divisi ini juga memberikan nasihat hukum kepada Bawaslu untuk memastikan semua langkah yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga hak-hak semua pihak tetap terlindungi.

Divisi SDM dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) memiliki peran strategis dalam memastikan kualitas sumber daya manusia di Bawaslu. Mereka bertugas menyelenggarakan pelatihan teknis dan edukasi yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pengawas pemilu di semua tingkatan. Program pelatihan ini tidak hanya mencakup pengetahuan tentang hukum pemilu tetapi juga keterampilan teknis di lapangan, sehingga setiap pengawas dapat menjalankan tugas mereka dengan profesional.

Keberadaan kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai pusat koordinasi dan pengawasan memberikan dampak besar dalam menciptakan pemilu yang berkualitas. Dengan struktur organisasi yang terencana dan fasilitas yang mendukung, Bawaslu Lamongan tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi di Kabupaten Lamongan. Seluruh upaya yang dilakukan bertujuan untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Lamongan, yang terdiri dari empat divisi utama—Pencegahan dan Humas,





**BAB III**  
**OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN BAWASLU KABUPATEN**  
**LAMONGAN**

**BAB IV**  
**SDM DAN ORGANISASI PENGAWAS AD HOC**

**BAB V**  
**KONTRIBUSI PENGAWAS AD HOC DALAM MENJAGA**  
**DEMOKRASI**

**Peran Pengawas Ad Hoc dalam Pemilu di Kabupaten Lamongan**

Bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, pelaksanaan pemilu adalah salah satu pilar fundamental yang menentukan arah politik dan pemerintahan. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa keputusan politik yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Seperti yang dikemukakan oleh Budiardjo (2008), pemilu adalah inti dari demokrasi. Namun, untuk menjaga agar proses ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran, pengawasan pada setiap tahapan pemilu menjadi sangat penting. Dalam sistem demokrasi Indonesia, pengawas ad hoc memegang peran sentral dalam mengawasi dan menjaga kualitas pemilu di tingkat lokal. Di Kabupaten Lamongan, kehadiran pengawas ad hoc menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam memastikan pemilu berlangsung secara sah dan terhindar dari kecurangan.

Pengawas ad hoc, yang bernaung di bawah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, berlangsung dengan adil dan sesuai aturan. Tugas mereka meliputi memantau,

mendeteksi, dan melaporkan potensi pelanggaran yang berisiko mencederai integritas pemilu. Selain itu, mereka juga berperan menciptakan suasana pemilu yang bebas dari intimidasi, politik uang, manipulasi suara, atau kecurangan lainnya. Dengan berada di garis terdepan, pengawas ad hoc menjadi penjaga keabsahan suara rakyat, memastikan setiap suara dihitung dan tidak disalahgunakan demi kepentingan tertentu.

Peran pengawas ad hoc di Lamongan sangat signifikan, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap politisasi tinggi atau tekanan politik lokal. Tradisi politik uang, misalnya, masih menjadi tantangan serius di beberapa daerah. Selain itu, intimidasi terhadap pemilih juga dapat muncul, baik di pedesaan maupun di kawasan perkotaan. Dalam konteks ini, pengawas ad hoc bertugas menjaga agar pemilih dapat menggunakan hak pilih mereka secara bebas tanpa ancaman atau tekanan. Mereka juga bertanggung jawab melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang, memastikan bahwa sanksi tegas diberikan kepada pelanggar untuk mencegah praktik serupa di masa depan.

Tidak hanya berperan dalam menjaga integritas proses pemilu, pengawas ad hoc juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberlanjutan demokrasi. Demokrasi sejati bukan hanya soal menyelenggarakan pemilu, tetapi juga memastikan bahwa proses dan hasil pemilu memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyat. Fuady (2010) menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sebagai fondasi demokrasi. Tanpa pengawasan yang memadai, kepercayaan

terhadap sistem pemilu bisa runtuh, menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat dan melemahkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pengawas ad hoc tidak hanya mengawasi jalannya pemilu secara teknis tetapi juga bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dan penyelenggara pemilu. Mereka memastikan bahwa setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan rasa aman, percaya bahwa suara mereka dihitung secara jujur dan adil.

Sebagai agen pendidikan demokrasi, pengawas ad hoc juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Mereka membantu menyosialisasikan hak dan kewajiban pemilih, prosedur pemilu, dan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu. Hal ini sangat relevan di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan politik yang masih rendah, di mana pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan pemilu seringkali terbatas. Melalui kegiatan seperti dialog publik, pelatihan, dan sosialisasi, pengawas ad hoc membantu memperkuat kesadaran politik masyarakat, mendorong mereka untuk lebih peduli terhadap proses demokrasi.

Selain itu, pengawas ad hoc juga mengawasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu di Lamongan. Setiap tahap pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawas ad hoc memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang, manipulasi data pemilih, atau pelanggaran lain yang dapat merusak kualitas pemilu. Jika

ditemukan penyimpangan, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan rekomendasi atau laporan kepada pihak yang berwenang.

Kontribusi pengawas ad hoc terhadap demokrasi di Lamongan sangatlah besar. Mereka tidak hanya bertugas sebagai pengawas teknis pemilu, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi, penguat kepercayaan publik, dan pendidik politik di tingkat lokal. Tanpa keberadaan mereka, kualitas dan legitimasi pemilu dapat terganggu, mengancam keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, peran pengawas ad hoc tidak hanya penting untuk keberhasilan pemilu, tetapi juga untuk memperkuat fondasi demokrasi yang adil, transparan, dan terpercaya di Kabupaten Lamongan.

Keberadaan pengawas ad hoc dalam pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan menunjukkan pentingnya sistem pengawasan yang bersifat lokal dan fleksibel. Pengawas ad hoc, yang direkrut untuk mengawasi pemilu pada tingkat kecamatan hingga desa, membawa pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sosial dan politik setempat. Pemahaman ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi potensi pelanggaran yang spesifik di wilayah tersebut, seperti tradisi politik uang atau praktik intimidasi terhadap pemilih. Dalam konteks Lamongan, yang memiliki keragaman sosial dan politik yang tinggi, pendekatan berbasis lokal ini memberikan keunggulan strategis untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil.

Selain itu, pengawas ad hoc berperan dalam menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan penyelenggara pemilu. Keberadaan mereka sebagai pihak independen yang berasal dari masyarakat lokal meningkatkan legitimasi pemilu di mata publik. Mereka dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemilih dan penyelenggara, menjawab kekhawatiran masyarakat, serta memastikan bahwa hak-hak pemilih terlindungi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, pengawas ad hoc memainkan peran penting sebagai pengontrol eksternal, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara pemilu, sekaligus memastikan transparansi dalam setiap tahapan pemilu.

Namun, efektivitas pengawas ad hoc sering kali dipengaruhi oleh beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, waktu pelatihan yang singkat, dan potensi tekanan dari aktor politik lokal. Di Lamongan, keberadaan dinamika politik lokal yang kompleks dapat menjadi hambatan serius bagi pengawas ad hoc dalam menjalankan tugas mereka. Dalam hal ini, penting bagi Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk memberikan pelatihan yang lebih intensif dan memastikan dukungan operasional yang memadai bagi pengawas ad hoc. Dengan begitu, mereka dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi, terlepas dari tekanan atau hambatan yang mungkin dihadapi.

Dari sudut pandang masyarakat, keberadaan pengawas ad hoc juga memengaruhi tingkat partisipasi politik. Ketika pengawasan pemilu dilakukan secara transparan dan akuntabel,

masyarakat cenderung memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap proses pemilu dan hasilnya. Hal ini dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif, baik dalam memberikan suara maupun dalam terlibat secara langsung sebagai relawan pengawas. Oleh karena itu, pengawas ad hoc tidak hanya berdampak pada proses teknis pemilu, tetapi juga pada dinamika politik jangka panjang, khususnya dalam membangun kepercayaan terhadap institusi demokrasi.

Sebagai garda terdepan pengawasan pemilu di tingkat lokal, pengawas ad hoc juga berfungsi sebagai indikator keberhasilan demokrasi yang inklusif. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi. Di Kabupaten Lamongan, hal ini mencerminkan kolaborasi yang erat antara masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas pemilu. Dengan memperkuat peran dan kapasitas pengawas ad hoc, Kabupaten Lamongan dapat menjadi contoh keberhasilan demokrasi lokal yang berbasis partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik.

### **Pengawas Ad Hoc di Kabupaten Lamongan sebagai Pilar Demokrasi Lokal**

Pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan sesuai dengan aturan. Dalam konteks demokrasi lokal, pemilu tidak sekadar menjadi



mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga merupakan fondasi utama dari kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, keberadaan pengawas ad hoc sangat vital dalam menjaga agar pemilu berjalan lancar dan mencerminkan kehendak rakyat. Di Kabupaten Lamongan, dengan segala keragaman sosial, budaya, dan tantangan geografisnya, pengawasan pemilu menjadi tugas yang menantang, namun tetap esensial untuk mendukung terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Sebagai daerah dengan kompleksitas sosial dan tantangan tersendiri, Kabupaten Lamongan menghadapi sejumlah masalah dalam memastikan pemilu bebas dari kecurangan dan manipulasi. Tantangan seperti tingginya risiko praktik politik uang, pengaruh kuat dari kelompok tertentu, serta rendahnya tingkat literasi politik sebagian masyarakat menjadi kendala utama. Dalam situasi seperti ini, pengawas ad hoc memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi. Mereka tidak hanya memantau proses pemilu, tetapi juga melindungi hak-hak pemilih serta memastikan semua peserta pemilu mengikuti aturan yang berlaku.

Pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan yang tergabung dalam lembaga seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas yang luas dan kompleks. Mereka memastikan bahwa setiap tahap pemilu, mulai dari pendaftaran calon dan pemilih, kampanye, hingga pemungutan serta penghitungan suara, berlangsung

dengan transparansi dan integritas tinggi. Tantangan geografis, terutama di daerah-daerah terpencil atau wilayah pesisir Kabupaten Lamongan, menambah tingkat kesulitan pengawasan. Namun, pengawas tetap diharapkan hadir di setiap tahapan untuk menjamin bahwa aturan dipatuhi dan potensi kecurangan dapat dicegah.

Keberadaan pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan juga berfungsi sebagai pilar utama akuntabilitas penyelenggara pemilu. Tanpa pengawasan yang ketat, risiko penyimpangan seperti manipulasi hasil suara atau penyalahgunaan anggaran pemilu dapat meningkat. Oleh karena itu, pengawas ad hoc yang berasal dari berbagai latar belakang masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan independensi tinggi. Mereka harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip integritas agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

Pengawasan yang efektif juga memberikan dampak langsung dalam mencegah kecurangan atau pelanggaran selama proses pemilu. Misalnya, di Kabupaten Lamongan, pengawas ad hoc memiliki peran penting dalam mencegah praktik politik uang yang masih sering terjadi, terutama di wilayah dengan kesenjangan ekonomi tinggi. Dengan melakukan pengawasan intensif selama masa kampanye dan proses pemungutan suara, mereka dapat mendeteksi tanda-tanda kecurangan sejak dini dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mengatasinya. Selain itu, pengawasan juga memastikan bahwa tidak ada

intimidasi terhadap pemilih atau manipulasi hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Keberadaan pengawas ad hoc juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Di Kabupaten Lamongan, di mana terkadang terdapat skeptisisme terhadap penyelenggara pemilu, pengawasan yang transparan dan independen membantu membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa pemilu berjalan adil dan bebas dari intervensi pihak tertentu, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Partisipasi aktif ini menjadi elemen kunci demokrasi, karena tanpa keterlibatan masyarakat, hasil pemilu tidak akan sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat.

Selain itu, pengawasan oleh pengawas ad hoc berdampak langsung pada kualitas pemilu itu sendiri. Proses seperti distribusi logistik, pendaftaran pemilih, hingga pemungutan suara harus dilakukan secara teliti dan diawasi dengan ketat. Pengawasan terhadap daftar pemilih tetap (DPT), misalnya, menjadi sangat penting di Kabupaten Lamongan yang memiliki banyak wilayah pedesaan dan pemilih yang sering berpindah tempat tinggal. Dengan memastikan bahwa DPT akurat, pengawas dapat mencegah adanya pemilih ganda atau pemilih yang terlewat dari proses.

Pengawas ad hoc juga memastikan bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilih mereka dengan bebas tanpa tekanan atau intimidasi. Di Kabupaten Lamongan, yang memiliki

keragaman budaya dan kelompok sosial, pengawasan terhadap kebebasan memilih menjadi lebih kompleks. Pengawas harus memastikan bahwa semua pemilih, baik dari kelompok mayoritas maupun minoritas, dapat memberikan suara tanpa gangguan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap politik uang, mobilisasi massa, dan distribusi bahan kampanye yang tidak sesuai aturan. Transparansi dalam penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu juga menjadi fokus utama pengawasan. Di Kabupaten Lamongan, potensi manipulasi suara di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau dapat diantisipasi melalui kehadiran pengawas di setiap proses penghitungan. Mereka memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar dan tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mengubah hasil pemilu. Dengan pengawasan yang ketat, hasil pemilu menjadi lebih dapat dipercaya dan mencerminkan kehendak rakyat.

Namun, pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, akses ke daerah terpencil, serta tekanan politik dari elit lokal. Koordinasi yang baik antara pengawas, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi hambatan ini. Pengawas harus mempertahankan integritas dan independensinya meskipun dihadapkan pada tekanan yang signifikan. Dengan pengawasan yang profesional dan berintegritas, mereka dapat memastikan bahwa pemilu di Kabupaten Lamongan berjalan dengan adil dan sesuai aturan, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi lokal.

Pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan tidak hanya berperan dalam memastikan teknis pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan demokrasi di tingkat lokal. Keberadaan mereka mencerminkan pentingnya pengawasan berbasis komunitas, di mana masyarakat lokal memiliki peran aktif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemilu. Dalam konteks Lamongan, yang memiliki karakteristik sosial dan politik yang beragam, pendekatan lokal ini memungkinkan pengawas untuk lebih memahami dinamika yang terjadi di lapangan, seperti potensi konflik antar kelompok atau pola kecurangan yang khas di wilayah tertentu.

Keberadaan pengawas ad hoc juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran politik masyarakat. Dengan adanya pengawas yang aktif memantau setiap tahapan pemilu, masyarakat menjadi lebih percaya diri untuk menggunakan hak pilihnya tanpa takut terhadap tekanan atau intimidasi. Kepercayaan ini menciptakan partisipasi yang lebih luas dan inklusif, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi hasil pemilu. Di Kabupaten Lamongan, yang memiliki berbagai lapisan sosial dan ekonomi, kehadiran pengawas membantu mengurangi kesenjangan partisipasi politik, khususnya di wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlibat dalam proses demokrasi.

Namun, tantangan utama yang dihadapi pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan adalah keterbatasan sumber daya dan

tekanan politik. Dalam beberapa kasus, tekanan dari aktor-aktor politik lokal dapat memengaruhi independensi pengawas, terutama di daerah yang memiliki tradisi politik patronase yang kuat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan intensif dan dukungan moral yang kuat dari Bawaslu Kabupaten Lamongan agar pengawas tetap berpegang pada prinsip independensi dan profesionalisme. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti akses transportasi dan komunikasi yang memadai menjadi kebutuhan mendesak, mengingat luasnya wilayah Lamongan yang mencakup daerah pesisir dan pedalaman.

Dari perspektif manajemen pemilu, pengawas ad hoc juga memainkan peran penting dalam mencegah kebocoran anggaran dan penyalahgunaan logistik pemilu. Transparansi yang mereka tegakkan pada setiap tahap pemilu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan sesuai peruntukannya dan tidak ada manipulasi data atau distribusi logistik yang merugikan salah satu pihak. Dengan pengawasan yang ketat, setiap penyimpangan dapat diidentifikasi sejak dini dan dilaporkan ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Hal ini tidak hanya menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu tetapi juga menghemat sumber daya negara.

Keberhasilan pengawasan oleh pengawas ad hoc juga memberikan dampak jangka panjang terhadap demokrasi di Kabupaten Lamongan. Ketika masyarakat melihat bahwa pemilu dilaksanakan dengan adil dan transparan, kepercayaan mereka

terhadap proses demokrasi semakin meningkat. Kepercayaan ini menciptakan siklus positif, di mana masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu dan lebih percaya pada hasilnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan membangun fondasi demokrasi yang lebih kuat, di mana masyarakat tidak hanya menjadi peserta pasif tetapi juga agen perubahan yang aktif dalam menentukan arah politik daerah mereka. Dengan demikian, peran pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan tidak hanya penting untuk keberhasilan pemilu, tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal.

### **Pencapaian dan Prestasi Pengawas Ad Hoc di Kabupaten Lamongan**

Pencapaian dan prestasi pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan dalam mengawal pemilu yang jujur, adil, dan transparan merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Di tengah dinamika politik yang kompleks, pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan berhasil memainkan peran strategis dalam menjaga integritas pemilu dengan mengatasi berbagai potensi pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi (Subekti, 2015). Meskipun menghadapi tantangan besar, pengawas ad hoc menunjukkan dedikasi, keberanian, dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan mereka tercermin dari pencegahan pelanggaran-pelanggaran besar serta penanganan kasus-kasus pelanggaran yang berujung pada terciptanya pemilu yang kredibel dan dipercaya masyarakat.

Sebagai kabupaten dengan beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis, Lamongan menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga agar pemilu berlangsung secara adil. Dengan sebagian wilayah terdiri dari daerah pesisir, pedesaan, dan kawasan terpencil, pengawasan pemilu menjadi semakin kompleks. Pengawas ad hoc di Lamongan, bekerja di bawah koordinasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Bawaslu, telah membangun kerja sama yang baik dengan lembaga seperti KPU, aparat keamanan, dan masyarakat. Mereka memastikan seluruh tahapan pemilu, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara, bebas dari manipulasi, kecurangan, dan tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Salah satu keberhasilan besar pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan adalah kemampuannya mendeteksi dan menangani berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Kasus politik uang, intimidasi terhadap pemilih, dan manipulasi suara menjadi contoh nyata tantangan yang berhasil diatasi. Praktik politik uang, yang sering terjadi di wilayah dengan tingkat ekonomi rendah, menjadi fokus perhatian pengawas. Dengan memanfaatkan jaringan masyarakat lokal dan koordinasi dengan pihak berwenang, pengawas berhasil mengumpulkan bukti pelanggaran dan mengambil tindakan preventif yang efektif. Keberhasilan ini tidak hanya mencegah kecurangan tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.



Pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan juga menghadapi tantangan terkait intimidasi terhadap pemilih, terutama di daerah yang memiliki tradisi politik lokal yang kuat. Intimidasi ini sering kali berupa ancaman langsung atau tekanan sosial yang memengaruhi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan. Pengawas ad hoc bekerja keras untuk melindungi hak-hak pemilih dengan memantau pemungutan suara secara ketat, menerima laporan dari masyarakat, dan melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Selain itu, pengawas ad hoc memiliki peran penting dalam mencegah manipulasi suara pada tahap penghitungan. Di Kabupaten Lamongan, pengawasan ketat terhadap penghitungan suara di TPS, tingkat desa, hingga kecamatan menjadi salah satu prioritas utama. Manipulasi data penghitungan suara, yang dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan, berhasil diminimalisir melalui kehadiran pengawas ad hoc yang bekerja dengan penuh dedikasi. Mereka memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar, dan setiap pelanggaran yang ditemukan dilaporkan untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Pencapaian lain yang patut diapresiasi adalah kemampuan pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan dalam menjaga independensi mereka meskipun menghadapi tekanan politik yang signifikan. Di wilayah yang memiliki hubungan erat antara elite politik dan masyarakat, tekanan untuk memengaruhi proses

pemilu sering kali tidak dapat dihindari. Namun, pengawas ad hoc berhasil mempertahankan integritas mereka dengan tetap berpegang pada prinsip objektivitas dan profesionalisme. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat kredibilitas pengawas tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

Melalui berbagai upaya ini, pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan telah membantu menciptakan pemilu yang lebih bersih dan adil. Dampak positifnya terlihat pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Kepercayaan ini mendorong partisipasi politik yang lebih besar, yang merupakan elemen vital dalam demokrasi. Edukasi politik yang dilakukan pengawas melalui sosialisasi dan dialog dengan masyarakat juga membantu meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya menjaga integritas pemilu.

Ke depan, pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan diharapkan dapat terus memperkuat kinerja mereka dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan logistik. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan pemilu yang lebih efektif. Dengan dedikasi yang telah terbukti, pengawas ad hoc di Lamongan dapat terus menjadi pilar utama demokrasi lokal, menjaga agar setiap pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara utuh.

Keberhasilan pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan dalam mengawasi jalannya pemilu mencerminkan efektivitas pendekatan pengawasan berbasis masyarakat. Pengawas ad hoc,

yang direkrut dari masyarakat lokal, memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik di wilayah mereka. Pemahaman ini memungkinkan mereka untuk lebih peka terhadap potensi pelanggaran, seperti praktik politik uang atau intimidasi pemilih, yang mungkin luput dari pengawasan tingkat nasional. Dengan pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas, pengawas ad hoc mampu menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan, memastikan tidak ada aspek pemilu yang terabaikan.

Namun, tantangan yang dihadapi pengawas ad hoc di Lamongan cukup signifikan, terutama terkait tekanan politik dari aktor-aktor lokal. Di beberapa wilayah, pengaruh elite politik atau kelompok tertentu sangat kuat, yang dapat memengaruhi independensi pengawas. Dalam konteks ini, pengawas ad hoc harus memiliki keteguhan moral dan dukungan struktural yang kuat untuk menjalankan tugas mereka dengan objektivitas. Pelatihan intensif dan pembekalan yang berkelanjutan dari Bawaslu Lamongan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pengawas dapat menghadapi tekanan semacam ini tanpa mengorbankan integritas.

Keberadaan pengawas ad hoc juga berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Di Kabupaten Lamongan, di mana ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu sering kali menjadi isu, pengawasan yang transparan dan independen dapat membantu membangun kembali kepercayaan tersebut. Ketika masyarakat

melihat bahwa pelanggaran ditangani dengan tegas dan suara mereka dihitung secara adil, mereka cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Peningkatan partisipasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi hasil pemilu tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas politik di daerah.

Selain itu, pengawas ad hoc berperan penting dalam mencegah dan menangani pelanggaran administratif yang sering kali terjadi pada tahap-tahap awal pemilu, seperti validasi daftar pemilih tetap (DPT) atau distribusi logistik pemilu. Di Kabupaten Lamongan, yang memiliki wilayah luas dan populasi yang tersebar, pengawasan terhadap DPT menjadi sangat penting untuk memastikan tidak ada pemilih yang terlewat atau terdaftar ganda. Dengan pengawasan yang teliti, pengawas ad hoc dapat meminimalkan potensi manipulasi di tahap awal ini, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas keseluruhan pemilu.

Dampak jangka panjang dari peran pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan adalah peningkatan kesadaran politik masyarakat. Pengawas tidak hanya bertugas mengawasi jalannya pemilu tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak politik mereka. Edukasi ini menjadi sangat penting, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki tingkat literasi politik rendah. Ketika masyarakat memahami pentingnya menjaga integritas pemilu dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, mereka menjadi lebih kritis terhadap pelanggaran dan lebih aktif dalam melaporkan ketidakberesan. Hal ini

menciptakan siklus positif yang memperkuat demokrasi lokal dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel.

Secara keseluruhan, pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan tidak hanya berperan sebagai pengawal teknis pemilu tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memperkuat fondasi demokrasi. Tantangan yang mereka hadapi memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas demokrasi di tingkat lokal, sementara pencapaian mereka menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, pengawasan pemilu dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan pemilu yang lebih bersih, adil, dan demokratis. Keberhasilan pengawas ad hoc di Lamongan menjadi contoh bagaimana pendekatan lokal dapat menghasilkan dampak besar dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

### **Dampak terhadap Kualitas Demokrasi di Kabupaten Lamongan**

Dalam sistem demokrasi yang sehat, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi elemen kunci yang menentukan kualitas demokrasi itu sendiri. Di Kabupaten Lamongan, pengawasan terhadap proses pemilu memainkan peran signifikan dalam menjaga agar demokrasi berjalan dengan baik. Tidak hanya memastikan pemilu berlangsung bebas dan adil, pengawasan juga melindungi hak-hak politik masyarakat. Pengawasan yang efektif bertujuan untuk mencegah kecurangan atau pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Dengan tantangan sosial,

politik, dan ekonomi yang dihadapi Kabupaten Lamongan, dampak dari pengawasan pemilu terhadap kualitas demokrasi menjadi semakin penting. Keberadaan pengawas yang cermat telah membantu memperkuat kepercayaan masyarakat yang sebelumnya mungkin meragukan integritas sistem pemilu.

Pengaruh politik lokal yang kuat, termasuk jejaring sosial dan budaya yang mendalam, sering kali menambah tantangan dalam memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil di Kabupaten Lamongan. Isu-isu seperti politik uang, manipulasi suara, dan tekanan sosial terhadap pemilih kerap muncul sebagai masalah utama. Namun, dengan adanya pengawasan yang ketat dari pengawas ad hoc seperti Panwaslu dan Bawaslu, banyak pelanggaran ini berhasil diidentifikasi dan dicegah. Salah satu dampak positif dari pengawasan tersebut adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Di masa lalu, ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu menjadi kendala besar, membuat banyak warga enggan berpartisipasi. Melalui pengawasan yang transparan dan konsisten, situasi ini perlahan berubah, mendorong partisipasi yang lebih besar di masyarakat. Pengawasan pemilu yang efektif di Lamongan juga bertindak sebagai jembatan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ketika warga melihat bahwa ada pihak independen yang bertanggung jawab untuk memastikan pemilu berjalan dengan adil dan bebas dari campur tangan politik yang tidak sah, mereka merasa lebih yakin untuk menggunakan hak pilih mereka. Transparansi dalam pengawasan menciptakan rasa keadilan yang

kuat di antara masyarakat. Hal ini terutama penting dalam konteks Lamongan, di mana tekanan sosial atau ekonomi dapat memengaruhi pilihan pemilih. Dengan adanya pengawasan yang terbuka dan berintegritas, pelanggaran seperti politik uang atau intimidasi terhadap pemilih dapat diminimalkan, menciptakan suasana demokrasi yang lebih sehat dan adil.

Selain itu, pengawasan pemilu juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Sebelumnya, kecurigaan terhadap penyelenggara sering kali muncul akibat kurangnya transparansi dalam proses pemilu. Dengan kehadiran pengawas yang independen, penyelenggara terpaksa bekerja lebih transparan dan akuntabel. Pengawas ad hoc di Lamongan tidak hanya memeriksa aspek teknis pemilu tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem, sehingga mendorong penyelenggara bekerja lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih percaya pada proses pemilu dan hasil yang dikeluarkan, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi demokrasi di daerah tersebut.

Partisipasi publik dalam pemilu juga meningkat berkat pengawasan yang efektif. Tingkat partisipasi politik merupakan indikator utama kualitas demokrasi. Di Kabupaten Lamongan, partisipasi pemilih menunjukkan tren positif setelah pengawasan diperkuat. Masyarakat merasa suara mereka dihargai dan bahwa ada sistem yang memastikan proses pemilu berjalan sesuai aturan. Dengan meningkatnya partisipasi, pemilu di Lamongan

semakin mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. Selain itu, pengawasan yang baik menciptakan efek jangka panjang dalam memperkuat fondasi demokrasi, dengan menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dan berkomitmen pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran politik masyarakat. Melalui sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pengawas, masyarakat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas pemilu. Pemilih tidak lagi menjadi objek pasif dalam proses pemilu, melainkan aktor aktif yang turut mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran. Hal ini menciptakan siklus demokrasi yang lebih inklusif, di mana warga tidak hanya memilih tetapi juga terlibat dalam memastikan proses pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi. Dengan demikian, pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan tidak hanya berdampak pada keberhasilan pemilu itu sendiri tetapi juga pada penguatan demokrasi secara keseluruhan.

Pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan telah memberikan dampak signifikan dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan pemilu. Salah satu elemen penting dalam demokrasi adalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik, dan pengawasan yang efektif telah menjadi pilar utama dalam membangun kembali kepercayaan tersebut. Dengan keterlibatan pengawas ad hoc, masyarakat melihat



adanya kontrol independen yang memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti. Hal ini memberikan rasa aman bagi pemilih dan menciptakan iklim demokrasi yang lebih stabil.

Dalam konteks Kabupaten Lamongan, dinamika sosial dan budaya yang beragam sering kali menghadirkan tantangan unik dalam proses pemilu. Keberadaan pengawas ad hoc yang berasal dari masyarakat lokal memberikan keuntungan karena mereka memahami kondisi setempat dan mampu mendeteksi potensi pelanggaran yang khas. Sebagai contoh, isu politik uang yang kerap terjadi di wilayah pedesaan dapat diminimalkan melalui pengawasan ketat di lapangan. Pengawas lokal memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga mampu menciptakan komunikasi yang lebih efektif dalam menyosialisasikan pentingnya pemilu yang bersih dan jujur.

Pengawasan juga berfungsi sebagai mekanisme checks and balances bagi penyelenggara pemilu seperti KPU. Di Kabupaten Lamongan, pengawas ad hoc tidak hanya memantau proses administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara sesuai dengan prinsip transparansi. Dengan adanya pengawasan, penyelenggara lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak kepercayaan publik. Hal ini sangat penting untuk membangun sistem pemilu yang akuntabel dan memastikan

bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, pengawasan yang ketat juga memberikan dampak jangka panjang pada pendidikan politik masyarakat. Di Kabupaten Lamongan, banyak masyarakat yang sebelumnya kurang memahami pentingnya partisipasi politik kini lebih aktif terlibat dalam proses pemilu. Edukasi yang dilakukan oleh pengawas ad hoc, seperti sosialisasi tentang hak dan kewajiban pemilih, telah membantu meningkatkan literasi politik masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam memilih tetapi juga menjadi lebih kritis terhadap pelanggaran yang terjadi. Ini menciptakan siklus demokrasi yang lebih sehat, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pemilu tetapi juga aktor yang aktif menjaga integritas proses demokrasi.

Namun, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah tekanan politik dari aktor-aktor lokal yang memiliki pengaruh besar di beberapa wilayah Kabupaten Lamongan. Tekanan semacam ini dapat memengaruhi independensi pengawas, terutama di daerah dengan hubungan politik yang erat antara elite lokal dan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, pengawas ad hoc memerlukan pelatihan yang intensif dan dukungan moral dari Bawaslu untuk memastikan bahwa mereka tetap dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi. Selain itu, perlindungan hukum bagi pengawas perlu diperkuat

agar mereka dapat bekerja tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Pengawasan yang baik juga berdampak pada peningkatan partisipasi politik, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya memiliki tingkat golput yang tinggi. Ketika masyarakat melihat bahwa proses pemilu diawasi dengan transparan dan bahwa pelanggaran ditindak dengan tegas, mereka merasa lebih percaya pada sistem pemilu. Hal ini mendorong partisipasi yang lebih luas, termasuk dari kelompok-kelompok yang sebelumnya enggan terlibat, seperti kaum muda dan masyarakat di daerah terpencil. Peningkatan partisipasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi hasil pemilu tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya peran mereka dalam demokrasi.

Keberhasilan pengawasan juga terlihat dari bagaimana pengawas mampu mencegah manipulasi suara pada tahap penghitungan. Di Kabupaten Lamongan, penghitungan suara sering menjadi titik rawan terjadinya pelanggaran, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Dengan adanya pengawasan ketat, potensi manipulasi dapat diminimalkan. Pengawas ad hoc memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar dan bahwa laporan hasil penghitungan sesuai dengan suara yang diberikan di TPS. Transparansi dalam proses penghitungan ini memberikan jaminan tambahan bagi masyarakat bahwa suara mereka benar-benar dihargai dan dihitung secara adil.

Dalam jangka panjang, dampak positif pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan adalah terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan legitimasi politik yang lebih kuat. Pemimpin yang terpilih melalui proses pemilu yang bersih cenderung lebih bertanggung jawab kepada rakyat, karena mereka memahami bahwa legitimasi mereka berasal dari dukungan masyarakat yang diperoleh melalui mekanisme yang adil. Pemerintahan yang responsif dan akuntabel ini menjadi fondasi bagi pembangunan demokrasi yang lebih matang di Lamongan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi juga bagian aktif dalam proses politik.

Secara keseluruhan, pengawasan pemilu yang dilakukan oleh pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan tidak hanya memperbaiki kualitas pemilu tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal. Dengan mencegah pelanggaran, meningkatkan partisipasi, dan membangun kepercayaan publik, pengawasan pemilu menjadi alat yang efektif untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Ke depan, tantangan yang ada harus terus diatasi dengan inovasi dan dukungan yang lebih besar bagi pengawas ad hoc, sehingga kualitas demokrasi di Kabupaten Lamongan dapat terus meningkat.

**BAB VI**  
**EVALUASI DAN REKOMENDASI**  
**Evaluasi Bawaslu Kabupaten Lamongan**

## **EPILOG**

## DAFTAR PUSTAKA